



RENJA TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2025 Dinas Sosial dan PMD, Renja Tahun 2025 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja Tahun 2025 dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dan PMD dapat berjalan dengan baik.

Boalemo, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



Dra MONRU MOPANGGA

Pembina Utama Muda
NIP.19960930 199702 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

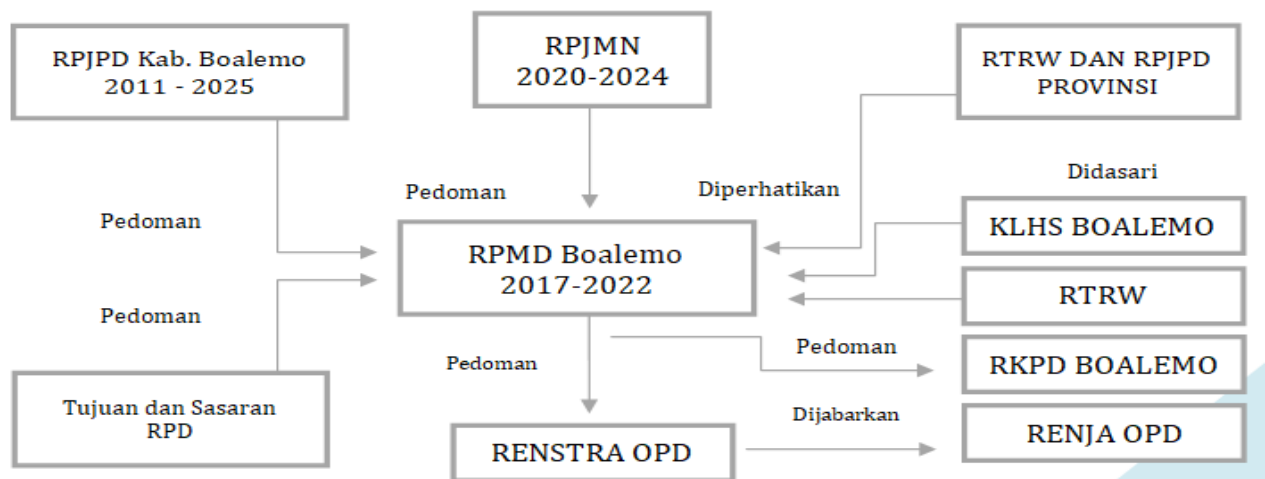
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 pengganti (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) Tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Startegi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Boalemo dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2025. Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial dan PMD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial dan PMD yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
2. Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial dan PMD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan PMD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial dan PMD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo tahun 2025;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial dan PMD; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial dan PMD.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial dan PMD

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial dan PMD adalah :

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.

2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi Tahun 2023-2026;
4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024, dan perkiraan realisasi Tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2025;
5. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial dan PMD.

c. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial dan PMD

Review hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dan PMD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas

Sosial dan PMD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD;

3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan PMD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan PMD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan PMD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan PMD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial dan PMD;
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial dan PMD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Sosial dan PMD. Namun dalam proses ini Dinas Sosial dan PMD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan Dinas Sosial dan PMD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan Awal Renja Dinas Sosial dan PMD

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Sosial dan PMD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja Dinas Sosial dan PMD dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dan PMD yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
 19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;
 20. Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026.
 21. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial dan PMD untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dan PMD.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan PMD selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
 PMD TAHUN LALU (TAHUN 2024)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL DAN PMD
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan PMD Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian Renstra Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2023-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2024 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial Dan PMD sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Dan PMD Tahun 2023-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel T-C. 29 berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitasnya Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik									
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1 06	Bidang Sosial									
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 06 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 06 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	120%	5 Dokumen	16	320%
1 06 01 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 06 01 01 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	105	300%
1 06 01 01 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54	300%

1	06	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
1	06	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	18	300%
1	06	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	75 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100%	125 Laporan	320	256%
1	06	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	60%	100%	60%	60%	100%	220%	220%	
1	06	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	133%	3 Unit	10	333%
1	06	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	67%	100%	100%	100%	100%	267%	267%	
1	06	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	400%	3 Laporan	17	567%
1	06	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	12 Laporan	12	100%
1	06	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	64%	100%	10%	10%	100%	174%	174%	
1	06	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	10 Unit	12	120%
1	06	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	45	300%
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat															
Sasaran : Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial															
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial			Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	126%	100%	100%	100%	100%	326%	326%	
1	06	02	2		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	100%	126%	100%	100%	100%	100%	326%	326%	

1	06	02	2	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	189 Keluarga	50 Keluarga	189 Keluarga	189 Keluarga	100%	189 Keluarga	428	226%	
1	06	02	2	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	100%	3 Keluarga	9	300%	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial			Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	60%	4524%	40%	104%	1900%	20%	4648%	7746%	
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya	51 Orang	769 Orang	34 Orang	646 Orang	1900%	17 Orang	1432	2808%	
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	51 Orang	356 Orang	34 Orang	169 Orang	497%	51 Orang	576	1129%
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	51 Orang	176 Orang	34 Orang	126 Orang	371%	51 Orang	353	692%
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	97 Orang	134 Orang	65 Orang	39 Orang	60%	97 Orang	270	278%
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	51 Orang	6 Orang	34 Orang	2 Orang	6%	51 Orang	59	116%
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	51 Orang	- Orang	34 Orang	76 Orang	224%	51 Orang	127	249%
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	51 Orang	240 Orang	34 Orang	319 Orang	938%	51 Orang	610	1196%
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	30 Orang	- Orang	20 Orang	8 Orang	40%	30 Orang	38	127%

1	06	04	2	01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12 Orang	30 Orang	8 Orang	4 Orang	50%	12 Orang	46	383%
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	6 Orang	- Orang	4 Orang	9 Orang	225%	6 Orang	15	250%
1	06	04	2	01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	3 Orang	- Orang	2 Orang	- Orang	0%	3 Orang	3	100%
1	06	04	2	01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	3 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	3 Orang	6	200%
1	06	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	6 Orang	2 Orang	4 Orang	2 Orang	50%	6 Orang	10	167%
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	0.00%	100%	0.00%	0%	100%	100%	167%	
1	06	05	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	- KK	- KK	- KK	0%	9351 KK	9351	100%
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 Keluarga	- Orang	- Keluarga	- Orang	0%	9351 Keluarga	9351	100%
Tujuan : Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Pelayanan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial															
Sasaran : Terpenuhinya Pelayanan Kebutuhan Dasar Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial															
1	06	06	Program Penanganan Bencana			Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	261%	100%	261%	261%	45%	567%	567%	
1	06	06	2	01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	60%	0.75%	40%	52%	130%	20%	73%	121%
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	35 Jiwa	4682 Jiwa	2439 Jiwa	52%	4682 Orang	7156	153%

2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	2 Lembaga	3 Lembaga	2 Lembaga	12 Lembaga	0%	2 Lembaga	17	850%	
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	3 Lembaga	5 Lembaga	12 Lembaga	240%	3 Lembaga	18	360%
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	400%	2 Dokumen	12	600%

Tilamuta, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dr. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

Dari data yang tersaji pada Tabel T-C. 29 diatas terlihat bahwa dari 6 (enam) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi laporan kinerja, 3 (tiga) indikator sasaran realisasinya mencapai target, 1 (satu) indikator sasaran realisasinya tidak mencapai target dan 2 (dua) indikator sasaran realisasinya melebihi target. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - a. Program Penanganan Bencana
Indikator Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, target capaian kinerja 100%, realisasi 52,09%. Dikarenakan tidak terjadi tanggap darurat bencana.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, target capaian kinerja 100%, realisasi 100%.
 - b. Program Pemberdayaan Sosial
Indikator Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan, target capaian kinerja 100%, realisasi 100%. Dikarenakan kemampuan Anggaran Daerah yang terbatas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa, target capaian kinerja 100%, realisasi 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - a. Program Rehabilitasi Sosial
Indikator Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, target capaian kinerja 20%, realisasi 4524%.
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Indikator Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan, target capaian kinerja 100%, realisasi 600%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kurangnya kompetensi dan kualitas pegawai dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan adalah untuk di tahun selanjutnya yaitu tahun 2025 untuk direncanakan kembali program/kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2023 maupun tahun 2024 di prioritaskan pada pemenuhan target kinerja program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Perkiraan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025 atau sedang berjalan terdiri dari :

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, target capaian kinerja 100%.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan, target capaian kinerja 100%.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, target capaian kinerja 60%.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial, target capaian kinerja 60%

4. Program Penanganan Bencana

Indikator Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, target capaian kinerja 100%.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang PMD terdiri dari :

1. Program Penataan Desa

Indikator Persentase Desa yang Tertata secara Representatif, target capaian kinerja 100%.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa, target capaian kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Indikator Persentase Peningkatan Kerjasama Desa, target capaian kinerja 7.30%.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan, target capaian kinerja 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan PMD

Sesuai Dokumen Renstra OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2024. Adapun penjelasan mengenai indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

Penjelasan Sasaran Dari Capaian Kinerja 2024

➤ **Sasaran 1**

Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial

- Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 189 KK, Realisasi capaian kinerja 189 KK.
- Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 3 Orang, Realisasi capaian kinerja 3 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 34 Orang, Realisasi capaian kinerja 169 Orang.

- Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 34 Orang, Realisasi capaian kinerja 126 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 65 Orang, Realisasi capaian kinerja 39 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Target kinerja 34 Orang, Relaisasi capaian kinerja 2 Orang.
- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Target kinerja 34 Orang, Relaisasi capaian kinerja 76 Orang.
- Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Target kinerja 34 Orang, Realisasi capaian kinerja 319 Orang.
- Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas, Target kinerja 20 Orang, Realisasi capaian kinerja 8 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Target kinerja 8 Orang, Realisasi capaian kinerja 4 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan, Target kinerja 4 Orang, Realisasi capaian kinerja 9 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan, Target kinerja 2 Orang, Realisasi capaian kinerja 0 Orang.
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga, Target kinerja 2 Orang, Realisasi capaian kinerja 2 Orang.
- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan, Target kinerja 4 Orang, Realisasi capaian kinerja 2 Orang.

➤ **Sasaran 2**

Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian), Target kinerja 4682 Orang, Realisasi capaian kinerja 2439 Orang.

➤ **Sasaran 3**

Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa, Target kinerja 82 Dokumen, Realisasi capaian kinerja 328 Dokumen.
- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas, Target kinerja 164 Orang, Realisasi capaian kinerja 438 Orang.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Target kinerja 7 Dokumen, Realisasi capaian kinerja 20 Dokumen.

➤ **Sasaran 4**

Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Target kinerja 5 Lembaga, Realisasi capaian kinerja 12 Lembaga.
- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Target kinerja 2 Dokumen, Realisasi capaian kinerja 8 Dokumen.

➤ **Sasaran 5**

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Target kinerja 5 Dokumen, Realisasi capaian kinerja 6 Dokumen.
- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Target kinerja 35 Orang, Realisasi capaian kinerja 35 Orang.
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD, Target kinerja 18 Laporan, Realisasi capaian kinerja 18 Laporan.
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Target kinerja 6 Paket, Realisasi capaian kinerja 6 Paket.
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Target kinerja 120 Laporan, Realisasi capaian kinerja 120 Laporan.
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, Target kinerja 3 Unit, Realisasi capaian kinerja 4 Unit.

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Target kinerja 3 Laporan, Realisasi capaian kinerja 12 Laporan.
- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Target kinerja 10 Unit, Realisasi capaian kinerja 1 Unit.
- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, Target kinerja 15 Unit, Realisasi capaian kinerja 15 Unit.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan PMD, dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 dibawah ini :

10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	75 Lap.	120 Lap.	125 Laporan	125 Laporan	75 Laporan	120 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	3 Lap.	3 Lap.	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Lap.	12 Lap.	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	
15	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	
16	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	15 Buah	15 Buah	15 Buah	15 Buah	-	-	15 Buah	15 Buah	
17	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	
18	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	-	-	-	189 Keluarga	189 Keluarga	189 Keluarga	189 Keluarga	50 Keluarga	189 Keluarga	189 Keluarga	189 Keluarga	
19	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	3 Keluarga	
20	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-	2 Lembaga	2 Lembaga	
21	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	-	-	-	17 Orang	34 Orang	51 Orang	68 Orang	356 Orang	169 Orang	51 Orang	68 Orang	
22	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	-	-	-	17 Orang	34 Orang	51 Orang	68 Orang	176 Orang	126 Orang	51 Orang	68 Orang	
23	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	-	-	-	32 Orang	65 Orang	97 Orang	130 Orang	134 Orang	39 Orang	97 Orang	130 Orang	

24	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	17 Orang	34 Orang	51 Orang	68 Orang	6 Orang	2 Orang	51 Orang	68 Orang	
25	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	-	-	17 Orang	34 Orang	51 Orang	68 Orang	240 Orang	319 Orang	51 Orang	68 Orang	
26	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	4 Orang	8 Orang	12 Orang	16 Orang	30 Orang	4 Orang	12 Orang	16 Orang	
27	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	1 Orang	2 Orang	3 Orang	4 Orang	1 Orang	2 Orang	3 Orang	4 Orang	
28	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	-	-	-	2 Orang	4 Orang	6 Orang	8 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang	8 Orang	
29	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	-	-	9351 KK	9351 KK	9351 Orang	9351 Orang	-	-	9351 Orang	9351 Orang	
30	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	-	9351 KK	9351 KK	9351 Keluarga	9351 Keluarga	-	-	9351 Keluarga	9351 Keluarga	
31	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	9351 KK	9351 KK	9351 Keluarga	9351 Keluarga	-	-	9351 Keluarga	9351 Keluarga	
32	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	-	10 Orang	10 Orang	
33	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	-	-	-	4682 Jiwa	4682 Jiwa	4682 Orang	4682 Orang	35 Jiwa	2439 Jiwa	4682 Orang	4682 Orang	
34	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	82 Dokumen	
35	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	-	-	82 Orang	164 Orang	164 Orang	164 Orang	391 Orang	438 Orang	164 Orang	164 Orang	
36	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	

37	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	3 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	3 Lembaga	12 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	
38	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

Tilamuta, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
- #### 2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional serta Realisasi nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo Tahun 2024 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada table di bawah ini.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahapan Pencapaian	Capaian Kabupaten		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	2024	100 %	100 %	100 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2024	100 %	100 %	100 %
		Persentase (%) Anak Terlantar				

		yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diLuar Panti Sosial				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	2024	100 %	100 %	100 %
		Persentase(%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diLuar Panti Sosial				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di LuarPanti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2024	-	-	-
		Persentase (%)				

		Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Sosial				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kab/Kota</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota</p>	2024	100 %	100 %	100 %
<p>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo</p>						100 %

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Boalemo

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
I	APBD	
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.164.571.749,-
2	Program Penanganan Bencana	8.930.950,-
Jumlah		1.173.502.699,-

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 35 Orang
- b. Non PNS = 23 Orang

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana yang sangat terbatas sangat mempengaruhi pencapaian Target Kinerja sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- Keterbatasan Alokasi anggaran dan Penentuan Alokasi Anggaran yang belum berdasarkan prioritas.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas PMD Provinsi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan PMD dalam rangka pencapaian kinerja Pelayanan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakeholder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukkan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun yang akan datang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu :
 1. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.
 2. Rencana pencapaian target tidak terukur dengan baik sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada.
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan di atas, berdampak terhadap pencapaian sasaran RPD 2023-2026 yaitu Meningkatnya Pemberdaayaan perempuan dan perlindungan anak

serta pengentasan permasalahan sosial dan Meningkatkan Status Desa dan Pemerataan Wilayah yang dijabarkan dalam RENSTRA OPD 2023-2026.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Mengembangkan dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
 2. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
 3. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
 4. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa
 5. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan
4. Tantangan-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

a. Tantangan

Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu:

- Rendahnya kesadaran masyarakat penerima bantuan dalam mengembangkan bantuan yang telah diberikan.
- Sulitnya mengakses data-data kesejahteraan sosial secara cepat dan akurat.
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi dinas lintas sektor.
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Terbukanya peluang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Boalemo.
 - Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
 - Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan.
5. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dan PMD, didasarkan atas telahaan terhadap pencapaian Renstra periode sebelumnya.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan PMD adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
2. Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada pengembangan kemandirian melalui peningkatan keterampilan dan penguatan akses bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dalam memanfaatkan sistim sumber;
3. Masih rendahnya pengetahuan aparat terkait administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan;
4. Adanya peningkatan permasalahan - permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan masalah bencana sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pelaku dunia usaha;
5. Kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat miskin dalam berusaha sehingga sulit untuk memperbaiki ekonomi keluarganya;
6. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak yang bisa diakomodir oleh pemerintah dalam penanganannya;
7. Memantapkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di Desa;
8. Memantapkan profil Desa sebagai basis data pelaksanaan pembangunan;
9. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam mengembangkan gotong royong;

10. Mendorong dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam;
11. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pada Dinas Sosial dan PMD yang masih sangat terbatas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Boalemo 2023 -2026, sehingga Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo juga merupakan Renja tahun ketiga dalam tahapan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2023-2026. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia baik Pengelola Program Sosial maupun Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Program dan Kegiatan yang bisa menunjang pengurangan angka kemiskinan.
3. Meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial.
4. Meningkatkan Sumber Daya yang ada di desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial dan PMD. Hasil Review dapat digambarkan pada Tabel T-C. 31 di bawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
	Bidang Sosial					Bidang Sosial							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	3,776,057,100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	3,776,057,100			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	1,025,000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	1,025,000		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	375,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	375,000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	375,000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	375,000	
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	275,000	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	275,000	
	4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	250,000	4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	250,000	

	5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	250,000		5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	250,000	
	6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	250,000		6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	250,000	
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	250,000		7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	250,000	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	3,434,385,010		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	3,434,385,010	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,432,885,010		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3,432,885,010	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,500,000		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,500,000	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	100%	750,000		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	100%	750,000	
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	750,000		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	750,000	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	27,250,000		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	27,250,000	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20,000,000		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20,000,000	

	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	5 Dokumen	1,250,000		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	5 Dokumen	1,250,000	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	6,000,000		3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	6,000,000	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	122,647,090		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	122,647,090	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,500,000		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,500,000	
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	115,147,090		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	115,147,090	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	141,500,000		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	141,500,000	
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125,000,000		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125,000,000	
	2	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1,500,000		2	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1,500,000	
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15,000,000	
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di	100%	20,500,000		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di	100%	20,500,000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500,000		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500,000	

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15,000,000		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15,000,000	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000	
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	28,000,000		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	28,000,000	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2,500,000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2,500,000	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2,500,000		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2,500,000	
	3	Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	1,500,000		3	Pemeliharaan Mebel	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	1,500,000	
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,500,000		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,500,000	
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Buah	20,000,000		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Dan PMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Buah	20,000,000	
2		Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Boalemo	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	126,321,400		Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Boalemo	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	126,321,400		
	1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab. Boalemo	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	100%	25,000,000		1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab. Boalemo	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	100%	25,000,000	

	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	10,000,000		1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 KK	10,000,000	
	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15,000,000		2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15,000,000	
	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kali	1,321,400		2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kali	1,321,400	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dok.	1,321,400		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dok.	1,321,400	
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	100,000,000		1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	100,000,000	
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	100,000,000		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	100,000,000	
3		Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	252,938,400			Program Rehabilitasi Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	252,938,400	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17 Orang	164,938,400		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	17 Orang	164,938,400	

1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	17 Orang	20,400,000	1	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	17 Orang	20,400,000
2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	13,038,400	2	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	13,038,400
3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	32 Orang	22,000,000	3	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	32 Orang	22,000,000
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	20,000,000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	20,000,000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	17 Orang	17,500,000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	17 Orang	17,500,000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	17 Orang	20,000,000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	17 Orang	20,000,000
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	7,500,000	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	10 Orang	7,500,000
8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4 Orang	5,000,000	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4 Orang	5,000,000
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	2 Orang	5,500,000	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	2 Orang	5,500,000

	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	14,000,000		10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	14,000,000	
	11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelurusan	1 Orang	10,000,000		11	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelurusan	1 Orang	10,000,000	
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	10,000,000		12	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	10,000,000	
	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	65 Orang	88,000,000		2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	65 Orang	88,000,000	
	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	65 Orang	5,000,000		1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	65 Orang	5,000,000	
	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	5,000,000		2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	1 Orang	5,000,000	
	3	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	15,000,000		3	Penyediaan Permakanan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	65 Orang	15,000,000	
	4	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1	65 Orang	10,000,000		4	Penyediaan Sandang	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1	65 Orang	10,000,000	
	5	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai	32 Orang	10,000,000		5	Penyediaan Alat Bantu	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai	32 Orang	10,000,000	
	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	65 Orang	5,000,000		6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	65 Orang	5,000,000	
	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	10,000,000		7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	10,000,000	

	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	65 Orang	10,000,000		8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	65 Orang	10,000,000	
	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	1 Orang	3,000,000.00		9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	1 Orang	3,000,000.00	
	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Orang	3,000,000		10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Orang	3,000,000	
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	3,000,000		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	3,000,000	
	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	1 Orang	3,000,000		12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	1 Orang	3,000,000	
	13	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	1 Orang	3,000,000		13	Pemberian Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	1 Orang	3,000,000	
	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	3 Orang	3,000,000		14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	3 Orang	3,000,000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Kab. Boalemo	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	20%	599,108,600		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Boalemo	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	20%	599,108,600		

1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Orang	38,598,600	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Orang	38,598,600		
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang	1 Orang		15,000,000	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang	1 Orang	15,000,000
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	1 Orang		15,000,000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	1 Orang	15,000,000
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	1 Orang	8,598,600	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Boalemo	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	1 Orang	8,598,600		
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	560,510,000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	560,510,000		
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK		40,000,000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 KK	40,000,000
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 KK		93,510,000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 KK	93,510,000
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	9351 KK		402,000,000	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	9351 KK	402,000,000
	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang		25,000,000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	25,000,000
5	Program Penanganan Bencana	Kab. Boalemo	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	212,558,700		Program Penanganan Bencana	Kab. Boalemo	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	212,558,700		

1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	177,558,700	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	177,558,700	
1	Penyediaan Makanan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	70,230,000	1	Penyediaan Makanan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	70,230,000	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	4682 Orang	50,000,000	2	Penyediaan Sandang	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	4682 Orang	50,000,000	
3	Penyediaan Tempat Penampungan	Kab. Boalemo	Jumlah Tempat Pengungsian	1 Kec.	17,328,700	3	Penyediaan Tempat Penampungan	Kab. Boalemo	Jumlah Tempat Pengungsian	1 Kec.	17,328,700	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	15,000,000	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50 Orang	15,000,000	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	4682 Orang	25,000,000	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Boalemo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	4682 Orang	25,000,000	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	7 Kali	35,000,000	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	7 Kali	35,000,000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kec.	15,000,000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kec.	15,000,000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135 Orang	20,000,000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135 Orang	20,000,000	
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
6	Program Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	100%	181,555,600	6	Program Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	100%	181,555,600	

1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	2 Desa	181,555,600	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	2 Desa	181,555,600			
	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa		50,000,000	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	50,000,000	
	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa		50,000,000	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	50,000,000	
	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa		25,000,000	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	3 Desa	25,000,000	
	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa		15,000,000	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	15,000,000	
	5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		15,000,000	5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000	
	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit		26,555,600	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	26,555,600	
7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	2.4%	202,606,000	7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	2.4%	202,606,000			
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	2 Desa	202,606,000	1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	2 Desa	202,606,000			
	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		32,606,000	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32,606,000	
	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		70,000,000	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70,000,000	
	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen		100,000,000	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	100,000,000	
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	479,481,000	8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	479,481,000			

1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	479,481,000	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	479,481,000
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	40,000,000	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Dokumen	40,000,000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk	82 Dokumen	30,000,000	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	82 Dokumen	30,000,000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82 Dokumen	35,000,000	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	82 Dokumen	35,000,000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	50,000,000	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	50,000,000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	40,000,000	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	40,000,000
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82 Laporan	25,000,000	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82 Laporan	25,000,000
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan	82 Laporan	20,000,000	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan	82 Laporan	20,000,000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	20,000,000	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	20,000,000
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	2 Laporan	35,000,000	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	2 Laporan	35,000,000
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25,000,000	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	25,000,000

	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Profil Desa	82 Dokumen	50,000,000		11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Profil Desa	82 Dokumen	50,000,000	
	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,000,000		12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	10,000,000	
	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	35,000,000		13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	10 Dokumen	35,000,000	
	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	82 Orang	30,000,000		14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	82 Orang	30,000,000	
	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	82 Laporan	19,481,000		15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	82 Laporan	19,481,000	
	16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	15,000,000		16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	15,000,000	
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Kab. Boalemo	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	282,129,600		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	282,129,600		
	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	282,129,600		1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	282,129,600	
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	3 Lembaga	25,000,000		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Kab. Boalemo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	3 Lembaga	25,000,000	

2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	2 Buah	17,000,000	2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Kab. Boalemo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	2 Buah	17,000,000
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	30,000,000	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	30,000,000
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20,000,000	4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	20,000,000
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	30,000,000	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	30,000,000
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	160,129,600	6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Dokumen	160,129,600

Tilamuta, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD


Drs. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660930 199702 2 002

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dan PMD dapat dilihat pada tabel T-C.32

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
	Bidang Sosial	Tidak ada usulan			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak ada usulan			

Tilamuta, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial dan PMD lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo.

Untuk urusan bidang Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut :

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Jamkesda.

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong"*** dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Indeks Partisipasi Sosial;
 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Visi dan Misi Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi **Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul, dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
 - Jumlah desa mandiri
 - Jumlah desa berkembang
 - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
 - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes berkembang
 - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :
 - Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :
 - Penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal

12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
 - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
 - Nilai Reformasi Birokrasi
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
 - Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan PMD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan PMD yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Boalemo dan isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari urusan sosial dan PMD adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Mengembangkan dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan

Dengan sasaran adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public
2. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa
5. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan dan akan Di perbandingkan/Disinkronisasikan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada Penambahan pagu indikatif di Tahun 2025 yang diprioritaskan pada pemenuhan Program dan Kegiatan yang ditahun sebelumnya belum memenuhi target serta untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun analisa kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

- 1. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 10. Pemberian Layanan Kedaruratan
 11. Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga
 12. Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2. Pemberian Layanan Kedaruratan
3. Penyediaan Permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan Alat Bantu
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
13. Pemberian Layanan Rujukan
14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
 3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 5. Pelayanan Dukungan Psikososial

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

C. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal meliputi :

1. Program Penataan Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
 5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
 6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
16. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 (Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan

koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Boalemo). Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD setelah e-planning relatif konsisten dari Rancangan Awal, tidak ada penambahan atau pengurangan kegiatan. Untuk Dinas Sosial dan PMD terdapat penambahan output kegiatan dikarenakan sebagai upaya pencapaian SPM.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu Tahun 2025 sesuai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2023-2026, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Boalemo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Bidang Sosial								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Sosial Dan PMD	100%	3,757,573,400	DAU/DAK/ PAD		100%	3,235,262,122
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Dinas Sosial Dan PMD	100%	2,025,000	DAU/DAK/ PAD		100%	2,025,000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	8 Dokumen	375,000	DAU/DAK/ PAD		8 Dokumen	375,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	5 Laporan	375,000	DAU/DAK/ PAD		5 Laporan	375,000
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	4 Laporan	275,000	DAU/DAK/ PAD		4 Laporan	275,000
	4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	1 Dokumen	250,000	DAU/DAK/ PAD		1 Dokumen	250,000
	5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	6 Data	250,000	DAU/DAK/ PAD		6 Data	250,000

	6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Dan PMD	2 Berita Acara	250,000	DAU/DAK/PAD		2 Berita Acara	250,000
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dinas Sosial Dan PMD	10 Dokumen	250,000	DAU/DAK/PAD		10 Dokumen	250,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	100%	3,434,385,010	DAU/DAK/PAD		100%	2,892,590,032
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Dan PMD	35 Orang	3,432,885,010	DAU/DAK/PAD		35 Orang	2,891,090,032
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	18 Laporan	1,500,000	DAU/DAK/PAD		18 Laporan	1,500,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	Dinas Sosial Dan PMD	100%	750,000	DAU/DAK/PAD		100%	750,000
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	14 Laporan	750,000	DAU/DAK/PAD		14 Laporan	750,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	Dinas Sosial Dan PMD	100%	27,250,000	DAU/DAK/PAD		100%	27,250,000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Sosial Dan PMD	1 Paket	20,000,000	DAU/DAK/PAD		1 Paket	20,000,000
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Dan PMD	6 Dokumen	1,250,000	DAU/DAK/PAD		7 Dokumen	1,250,000
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Dan PMD	34 Orang	6,000,000	DAU/DAK/PAD		34 Orang	6,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Dan PMD	100%	122,647,090	DAU/DAK/PAD		100%	122,647,090
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	6 Paket	7,500,000	DAU/DAK/PAD		6 Paket	7,500,000
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Dan PMD	125 Laporan	115,147,090	DAU/DAK/PAD		125 Laporan	115,147,090
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Dinas Sosial Dan PMD	100%	122,016,300	DAU/DAK/PAD		100%	141,500,000

	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	2 unit	105,516,300	DAU/DAK/PAD		2 unit	125,000,000
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	5 Unit	1,500,000	DAU/DAK/PAD		5 Unit	1,500,000
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	3 Unit	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Unit	15,000,000
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	Dinas Sosial Dan PMD	100%	20,500,000	DAU/DAK/PAD		100%	20,500,000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Dan PMD	4 Laporan	500,000	DAU/DAK/PAD		4 Laporan	500,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	3 Laporan	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Laporan	15,000,000
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial Dan PMD	12 Laporan	5,000,000	DAU/DAK/PAD		12 Laporan	5,000,000
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Dinas Sosial Dan PMD	100%	28,000,000	DAU/DAK/PAD		100%	28,000,000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Sosial Dan PMD	10 Unit	2,500,000	DAU/DAK/PAD		10 Unit	2,500,000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial Dan PMD	10 Unit	2,500,000	DAU/DAK/PAD		10 Unit	2,500,000
	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Sosial Dan PMD	15 Unit	1,500,000	DAU/DAK/PAD		15 Unit	1,500,000
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial Dan PMD	15 Unit	1,500,000	DAU/DAK/PAD		15 Unit	1,500,000
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial Dan PMD	2 Unit	20,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Unit	20,000,000
2		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kab. Boalemo	100%	78,454,300	DAU/DAK/PAD		100%	129,560,900
	1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	Kab. Boalemo	100%	25,000,000	DAU/DAK/PAD		100%	25,000,000
	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	189 Keluarga	10,000,000	DAU/DAK/PAD		189 Keluarga	10,000,000

	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	3 Keluarga	15,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Keluarga	15,000,000
	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	10 Kali	3,454,300	DAU/DAK/PAD		10 Kali	4,560,900
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boalemo	10 Dok.	3,454,300	DAU/DAK/PAD		10 Dok.	4,560,900
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	2 Kali	50,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Kali	100,000,000
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kec.	2 Lembaga	50,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Lembaga	100,000,000
	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	60%	254,209,150	DAU/DAK/PAD		80%	259,424,950
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	169,209,150	DAU/DAK/PAD		68 Orang	171,424,950
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	15,400,000	DAU/DAK/PAD		68 Orang	15,400,000
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	17,309,150	DAU/DAK/PAD		68 Orang	19,524,950
	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Desa se Kab. Boalemo	97 Orang	12,000,000	DAU/DAK/PAD		130 Orang	12,000,000
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		68 Orang	10,000,000
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	17,500,000	DAU/DAK/PAD		68 Orang	17,500,000
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	51 Orang	54,000,000	DAU/DAK/PAD		68 Orang	54,000,000

	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Desa se Kab. Boalemo	30 Orang	4,500,000	DAU/DAK/PAD		40 Orang	4,500,000
	8	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	12 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		16 Orang	5,000,000
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	6 Orang	2,500,000	DAU/DAK/PAD		8 Orang	2,500,000
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	14,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	14,000,000
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	10,000,000
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	6 Orang	7,000,000	DAU/DAK/PAD		8 Orang	7,000,000
2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	85,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	88,000,000
	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	5,000,000
	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	5,000,000
	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	15,000,000
	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	10,000,000
	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Desa se Kab. Boalemo	97 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		130 Orang	10,000,000
	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	5,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	5,000,000
	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	10,000,000
	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Desa se Kab. Boalemo	195 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD		260 Orang	10,000,000

	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	3,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	3,000,000
	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	3,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	3,000,000
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	3,000,000
	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	3,000,000
	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Desa se Kab. Boalemo	3 Orang	2,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	3,000,000
	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	3 Dokumen	3,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Dokumen	3,000,000
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Boalemo	60%	285,018,165	DAU/DAK/PAD		80%	614,472,650
	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Boalemo	4 Orang	38,505,628	DAU/DAK/PAD		4 Orang	38,596,239
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Kab. Boalemo	3 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	15,000,000
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Kab. Boalemo	3 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Orang	15,000,000
	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Kab. Boalemo	3 Orang	8,505,628	DAU/DAK/PAD		4 Orang	8,596,239
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	Kab. Boalemo	9351 KK	246,512,537	DAU/DAK/PAD		9351 KK	575,876,411
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Boalemo	9351 Orang	15,000,000	DAU/DAK/PAD		9351 KK	50,371,000
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	9351 Keluarga	20,000,000	DAU/DAK/PAD		9351 KK	98,505,411
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	9351 Keluarga	191,512,537	DAU/DAK/PAD		9351 KK	402,000,000
	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boalemo	10 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		10 Orang	25,000,000

5	Program Penanganan Bencana		Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kab. Boalemo	100%	95,000,000	DAU/DAK/PAD	100%	218,009,700
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	Kab. Boalemo	60%	75,000,000	DAU/DAK/PAD	80%	183,009,700
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Boalemo	4682 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD	4682 Orang	70,230,000
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Boalemo	4682 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD	4682 Orang	50,000,000
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	Kab. Boalemo	3 Unit	15,000,000	DAU/DAK/PAD	5 Unit	22,779,700
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boalemo	50 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD	50 Orang	15,000,000
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Kab. Boalemo	4682 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD	4682 Orang	25,000,000
	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Boalemo	7 Kali	20,000,000	DAU/DAK/PAD	7 Kali	35,000,000
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boalemo	3 Kampung	10,000,000	DAU/DAK/PAD	3 Kampung	15,000,000
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boalemo	135 Orang	10,000,000	DAU/DAK/PAD	135 Orang	20,000,000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
6	Program Penataan Desa		Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	Desa se Kab. Boalemo	100%	70,000,000	DAU/DAK/PAD	100%	186,211,550
	1		Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa se Kab. Boalemo	5 Desa	70,000,000	DAU/DAK/PAD	6 Desa	186,211,550
	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Desa	20,000,000	DAU/DAK/PAD	2 Desa	50,000,000

	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa se Kab. Boalemo	5 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		6 Desa	51,000,000
	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa se Kab. Boalemo	6 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		8 Desa	26,588,431
	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa se Kab. Boalemo	1 Desa	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Desa	15,000,000
	5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	2 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Laporan	15,000,000
	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Desa se Kab. Boalemo	4 Unit	10,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Unit	28,623,119
7	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Desa se Kab. Boalemo	7.3%	35,000,000	DAU/DAK/PAD		9.8%	207,801,750
	1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	Desa se Kab. Boalemo	2 Desa	35,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Desa	207,801,750
	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	3 Dokumen	15,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	33,606,011
	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa se Kab. Boalemo	1 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		1 Dokumen	72,464,210
	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa se Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	101,731,529
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	100%	195,000,000	DAU/DAK/PAD		100%	491,777,150
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Desa	195,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Desa	491,777,150
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	20 Dokumen	20,000,000	DAU/DAK/PAD		32 Dokumen	40,000,000
	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	30,000,000
	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	35,000,000
	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	62,296,147
	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa se Kab. Boalemo	164 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		164 Orang	40,000,000
	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	25,000,000

	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	20,000,000
	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa se Kab. Boalemo	7 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		7 Dokumen	20,000,000
	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	3 Laporan	15,000,000	DAU/DAK/PAD		4 Laporan	35,000,000
	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Laporan	25,000,000
	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Dokumen	50,000,000
	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa se Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Dokumen	10,000,000
	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Desa se Kab. Boalemo	15 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		20 Dokumen	35,000,000
	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa se Kab. Boalemo	82 Orang	20,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Orang	30,000,000
	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Desa se Kab. Boalemo	82 Laporan	10,000,000	DAU/DAK/PAD		82 Laporan	19,481,003
	16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa se Kab. Boalemo	20 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		32 Dokumen	15,000,000
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kab. Boalemo	100%	40,000,000	DAU/DAK/PAD		100%	289,364,800
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	Kab. Boalemo	2 Lembaga	40,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Lembaga	289,364,800
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Boalemo	5 Lembaga	10,000,000	DAU/DAK/PAD		5 Lembaga	25,000,000

2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Boalemo	3 Unit	5,000,000	DAU/DAK/PAD		3 Unit	19,352,374
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Boalemo	13 Dokumen	5,000,000	DAU/DAK/PAD		15 Dokumen	30,000,000
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Boalemo	2 Laporan	5,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Laporan	20,000,000
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Boalemo	2 Dokumen	5,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	30,000,000
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	2 Dokumen	10,000,000	DAU/DAK/PAD		2 Dokumen	165,012,426

Tilamuta, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



Dra. MONRU MOPANGGA

NIP. 19660930 199702 2 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2025, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2025 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial dan PMD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dan PMD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Boalemo yang di dasarkan pada Program dan Tujuan Strategis yang telah direncanakan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial dan PMD Tahun 2025 ini, maka harapan yang telah direncanakan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai melampaui target dan dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Boalemo, Januari 2025
Kepala Dinas Sosial dan PMD
Kabupaten Boalemo



Dra. MONRU MOPANGGA
N.P. 19660930 199702 2 002